

# **Kertas Posisi Indonesia for Global Justice (IGJ) “Irrelevant Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi”**

## **Intisari**

Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu perdagangan dan investasi, dengan juga berperan aktif pada kampanye #EndWTO 2013 bersama Aliansi Gerak Lawan, menyerukan Akhiri WTO dan tolak berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-10, Nairobi, Kenya.

## **Latar Belakang**

Indonesia for Global Justice (IGJ) adalah salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu perdagangan dan investasi, bergerak dalam advokasi kebijakan ekonomi secara nasional maupun internasional.

Dalam merespon Konferensi Tingkat Menteri (KTM) dari Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization/WTO*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya, IGJ mengeluarkan sebuah Kertas Posisi, dan mengambil posisi pada dua hal yakni: **(1) Akhiri WTO; (2) Menolak KTM ke-10 karena tidak relevan bagi masyarakat dunia.**

Klaim tersebut dibangun dalam empat rasionalisasi: (1) Selama 20 tahun berdirinya WTO, tidak terdapat perbaikan pada sistem perdagangan dunia. Apa yang terjadi justru keterpurukan di skala makro; (2) “Paket Bali”, sebagai capaian tertinggi WTO, justru mempertajam persoalan pangan dunia maupun nasional; (3) WTO dijalankan dengan mekanisme yang tidak demokratis; dan, (4) Agenda kerja untuk pertemuan KTM ke-10 tidak disusun untuk kepentingan negara berkembang.

Sehingga IGJ mendorong agar Pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti pertemuan yang tidak matang dan rawan diselewengkan korporasi dan Negara-negara industri tersebut.

## **Akhiri WTO**

### **1. 20 Tahun Kegagalan WTO**

*World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan pada tahun ini telah memasuki usia yang ke-20. Selama 20 tahun berjalan, sesungguhnya WTO telah gagal mencapai sebuah capaian signifikan untuk mengentaskan kemiskinan dan skema perdagangan yang berkeadilan. WTO lebih berfungsi untuk memastikan arus liberalisasi perdagangan global berjalan lancar ketimbang menciptakan perdagangan yang berkeadilan.

Bahkan, liberalisasi perdagangan yang didorong oleh WTO semakin tidak relevan untuk terus dipertahankan hari ini. Ditengah krisis ekonomi global yang mendorong penurunan tajam kinerja perdagangan global, terlihat kecenderungan kebijakan yang diambil negara-negara anggota WTO terus mengarah pada tindakan perlindungan demi penyelamatan ekonomi nasional.

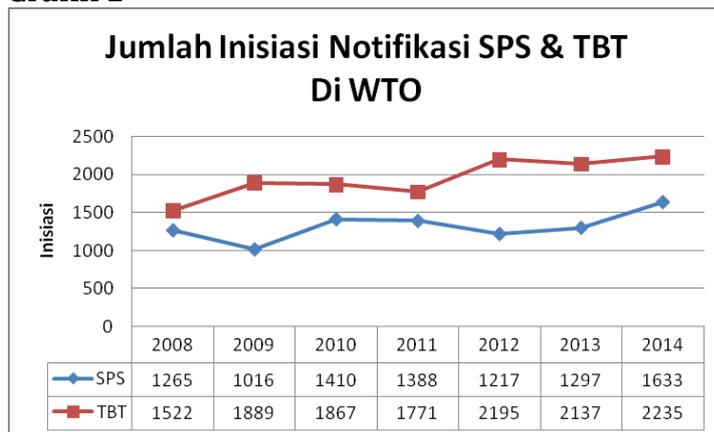
Laporan monitoring perdagangan WTO 2015<sup>1</sup> menyebutkan bahwa sejak krisis ekonomi global menghantam pada 2008, terjadi peningkatan terhadap tindakan pembatasan perdagangan. Dalam periode monitoring Nov 2012- Okt 2013 penerapan pembatasan perdagangan tercatat sebanyak 168 tindakan. Memasuki periode Nov 2013-Okt 2014 tindakan pembatasan perdagangan telah meningkat hingga 339 tindakan yang berkontribusi terhadap nilai perdagangan impor sebesar US\$ 257,5 Miliar.

Dalam laporan yang sama, IGJ mencatat paling tidak tindakan pembatasan perdagangan ini dikontribusikan oleh 5 ketentuan dalam perdagangan barang, yakni **Pertama**, tindakan subsidi dan akses pasar Pertanian; **Kedua**, tindakan SPS (Sanitary and Phytosanitary); **Ketiga**, tindakan Technical Barrier to Trade (TBT); **Keempat**, tindakan subsidi dan countervailing measures; dan **Kelima**, penerapan Safeguards.

Dalam tindakan subsidi dan akses pasar pertanian, bahwa disepanjang tahun 2014 dari total 239 negara yang mempertanyakan 80 notifikasi untuk tindakan ini, tercatat sebanyak 76,7% mengarah pada isu Subsidi domestik (Domestic Support), 16,7% untuk akses pasar, dan 6,7% untuk subsidi ekspor.

Untuk tindakan SPS, dalam 15 tahun terakhir terjadi lonjakan notifikasi dari 468 inisiasi menjadi 1.633 inisiasi. Sedangkan untuk TBT, dalam jangka waktu yang sama mengalami lonjakan hingga 2.235 pada 2014 dimana di tahun 2000 inisiasi notifikasi baru sebanyak 633 inisiasi (**Lihat Grafik 1**).

**Grafik 1**



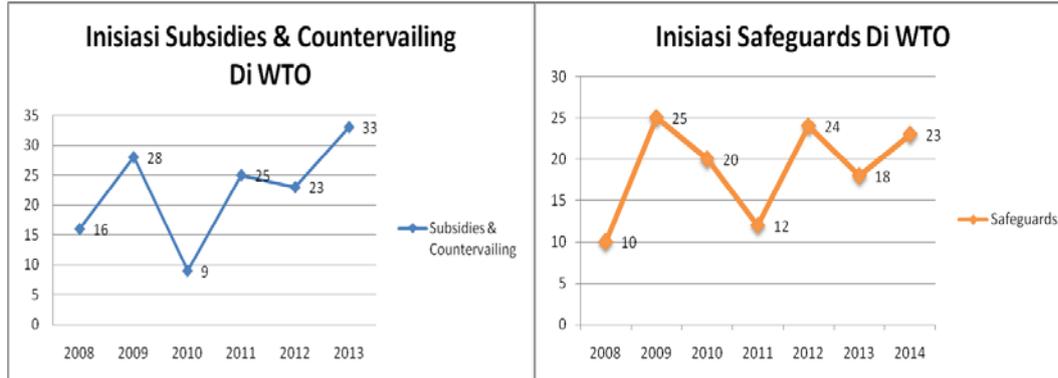
Sumber: Data IGJ diolah dari WTO Report 2015

Dalam hal tindakan subsidi dan countervailing measures, jika dilihat dari dinamikanya sejak krisis ekonomi global 2008 hingga 2013 fluktuatif tapi cenderung meningkat. Pada 2008, inisiasi tindakan ini hanya tercatat 16 inisiasi dan sempat turun pada 2010 sebanyak 9 inisiasi, namun naik kembali secara tajam pada 2010 terus hingga 2013 yang secara berturut-turut adalah 25 (2011), 23 (2012), dan 33 (2013). Secara detail bisa dilihat pada **Grafik 2**.

Ketidakpastian global, berdampak pada perilaku negara yang menerapkan safeguard. Kecenderungan yang terjadi sejak 2008 hingga 2013 pun terlihat fluktuatif tajam, tidak linier. Artinya perilaku ini menggambarkan tingkat kehati-hatian dalam membuka pasar cukup tinggi. Lonjakan penerapan Safeguard sangat tajam pada 2009 yang terhitung hingga 25 inisiasi dibandingkan 2008 yang terhitung hanya 10 inisiasi. Namun memasuki 2010-2014 fluktuatif insiasi terjadi namun rata-rata menyentuh angka 20 hingga 23 inisiasi hingga 2014 (**Lihat Grafik 2**).

<sup>1</sup> WTO Annual Report 2015 – Monitoring Implementation

Grafik 2



Sumber: Data IGJ Diolah dari WTO Report 2015

## 2. Irrelevansi “Paket Bali”

Dinamika KTM ke-9 tahun 2013, yang seringkali dibanggakan sebagai pencapaian tertinggi WTO hingga hari ini (Foreign Policy, 2013), sesungguhnya pun tidak menyelesaikan perbedaan kepentingan yang ada di antara negara industri maju dan negara berkembang. Malah justru “Paket Bali”, sebagai hasil dari KTM ke-9, menjadi kesepakatan terburuk WTO dalam melindungi petani dan kedaulatan pangan negara-negara berkembang dan kurang berkembang.

### “Tiga isu Paket Bali”

Pertanian, yang mencakup masalah penimbunan stok cadangan pangan untuk ketahanan pangan, persaingan ekspor produk pertanian, dan administrasi *tariff rate quota*;

Fasilitasi perdagangan (terkait aturan pergerakan barang di kepabeanan); dan

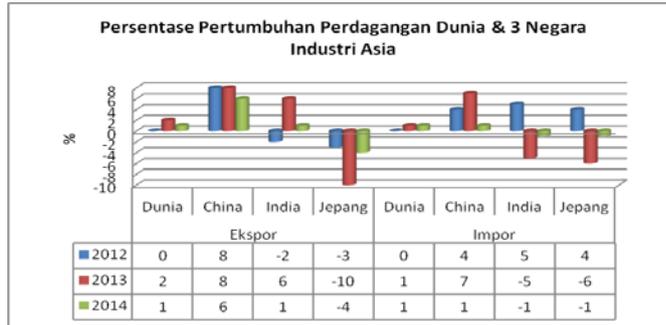
Masalah pembangunan untuk negara kurang berkembang seperti *duty free-quota free*, ketentuan Surat Keterangan Asal, dan kemudahan akses pasar jasa ke negara-negara maju.

“Paket Bali” yang terdiri dari tiga isu dicapai dengan politik pertukaran (*trade-off*) untuk menyelesaikan dua tawaran: Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*) yang didorong negara industri maju dan Proposal Cadangan Pangan untuk Ketahanan Pangan (*Public Stockholding for Food Security*) dalam Perjanjian Pertanian yang didorong oleh negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok 33 (G-33). Paket Bali mengambil tiga isu ini dari 17 Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda/DDA*) dengan harapan dapat menyelesaikan secara perlahan Putaran Doha dari 14 tahun kebuntuannya.

Jika kita sepakat bahwa capaian terbesar WTO adalah Paket Bali, sesungguhnya mempertebal argumentasi tentang “Kegagalan WTO” karena apa yang terjadi adalah Paket Bali yang dijadikan harapan untuk meningkatkan performa perekonomian global disaat krisis ekonomi nampaknya jauh dari harapan. Bahkan perdagangan barang dan pertumbuhan perdagangan dunia mengalami penurunan pasca-Paket Bali 2013.

Data WTO menyebutkan bahwa dengan pertumbuhan dunia yang terus mengalami penurunan sejak 2011 hingga 2013, berturut-turut yakni 2,8% (2011), 2,3% (2012), dan 2,2% (2013), kinerja perdagangan dunia juga terus mengalami koreksi. Hasil monitoring WTO terhadap persentase perubahan kinerja ekspor-impor menguatkan argumentasi ini. Terhitung sejak 2012-2014, persentase perubahannya kecenderungannya stagnan dan bahkan terus mengalami penurunan, khususnya di tiga negara industri besar di Asia seperti China, India, dan Jepang. Secara lebih detail persentase penurunannya dapat dilihat dalam gambar **Grafik 3**.

### Grafik 3



Sumber: Data IGJ Diolah dari WTO Report 2015

Data penurunan ini menunjukkan bahwa prediksi WTO yang menyebutkan bahwa keberhasilan Paket Bali akan meningkatkan perdagangan dunia tidak terbukti. Bahkan, situasi ini diperparah dengan penurunan harga komoditas dunia, khususnya pangan, yang pada akhirnya memberikan dampak buruk terhadap situasi pangan nasional. Data UNCTAD 2015 menyebutkan disepanjang tahun 2014 index harga komoditas turun sebesar 6,1%. Penurunan ini didorong oleh anjloknya harga beberapa kelompok komoditas seperti: **Pertama**, agricultural raw materials 9,9%; **Kedua**, mineral, bijih besi, dan metal 8,5%; **Ketiga**, pangan 5,9%; **dan Keempat**, minyak nabati 5,8%.<sup>2</sup>

Seharusnya, penurunan harga komoditas pangan secara makro dapat dilihat sebagai hal yang positif, dengan asumsi bahwa jika harga pangan menurun, masyarakat miskin memiliki kemampuan membeli komoditas pangan. Padahal, penurunan harga umumnya terjadi akibat melimpahnya suplai yang tidak diimbangi dengan naiknya permintaan. Saat harga menurun akibat melimpahnya suplai, para petani lokal yang menanggung biaya produksi akan menjadi subyek yang merugi. Penurunan drastis pada beberapa komoditas pangan ini terjadi selain karena adanya krisis ekonomi global, juga karena banyaknya pasokan komoditas pangan yang masuk ke pasar melalui impor.<sup>3</sup>

Nilai impor pangan nasional disepanjang 2014 sebesar US\$ 15,86 Miliar atau setara dengan 22,53 juta ton, meningkat dibandingkan dari nilai impor 2013 yang hanya sebesar US\$ 12,73 Miliar atau setara dengan 17,48 juta ton. Peningkatan ini dikontribusikan oleh impor tanaman pangan (beras, gandum, kedelai, dan jagung) sebesar 18,16 juta ton, Hortikultura sebesar 1,64 juta ton, dan Hasil Ternak sebesar 1,48 juta ton<sup>4</sup>. Kondisi ini secara nasional telah menimbulkan persoalan pada sektor pertanian Indonesia, khususnya petani lokal, dan membuat komoditas pangan tidak ada harganya. Konsekuensi langsung dari itu tentu adalah kesejahteraan petani kecil dan lokal.



Misalnya saja, belum lama ini media massa dibanjiri oleh fenomena pembuangan tomat di selokan pinggir jalan raya Cikajang, Garut, Jawa Barat oleh petani tomat yang kesal karena satu kilogram tomat dihargai yang sebelumnya sempat ada pada harga Rp6.405 menurun drastis menjadi Rp200. (Sumber gambar: BBC.com)

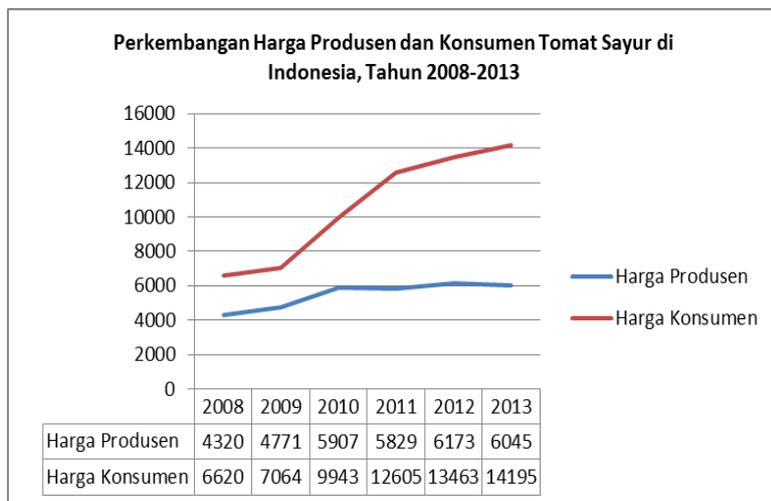
<sup>2</sup> UNCTAD Report Commodity Price Index April 2015.

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/09/nr7nl9-sudah-sebulan-harga-tomat-di-tingkat-petani-anjlok>

<sup>4</sup> Data Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 2014, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Vol VII No.1 Tahun 2015.

Perkembangan harga produsen tomat sayur di Indonesia pada tahun 2005-2013 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,08% per tahun (**Grafik 4**).<sup>5</sup>

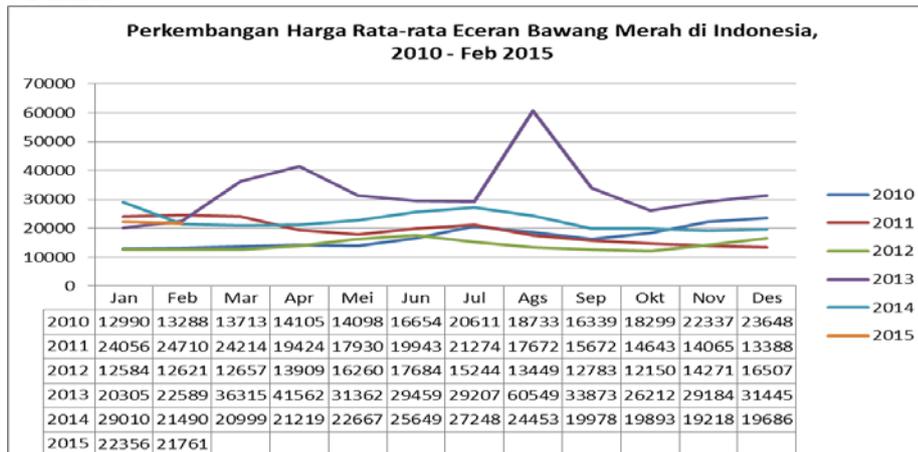
**Grafik 4**



Pada komoditas bawang dan cabai pun sama terpuruknya. Harga pangan mengalami kenaikan lalu penurunan secara drastis. Harga bawang merah mengalami pemerosotan tajam menjadi Rp4.000 per kilogram pada bulan Agustus 2015. <sup>6</sup> *Oversupply* menjadi penyebab dari penurunan ini.

Sumber: Statistik Harga Komoditas Pertanian 2013, Kementerian Pertanian

**Grafik 5**



Sumber: Buletin Analisis Perkembangan Harga : Maret 2015, Kementerian Pertanian

Tetapi hal krusial adalah harga tersebut jauh di bawah harga produksi. Dengan harga Rp4.000 per kilogram, panen diperkirakan mendapatkan harga Rp12.000.000. Sementara biaya produksi mencapai Rp20.000.000.<sup>7</sup> Petani baru dapat menutup biaya produksi dengan minimal harga jual Rp10.000 per kilogram.<sup>8</sup> Belum lagi impor bawang ilegal yang menghancurkan pasar bawang nasional.<sup>9</sup> Hal ini berkorelasi langsung dengan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional sebesar 1,37 persen pada April 2015 dibandingkan bulan sebelumnya. Penyebabnya, indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 1,07 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,30 persen.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Pertanian. Harga Komoditi Tomat 2014. pdf

<sup>6</sup> <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/08/21/160566/di-brebes-harga-bawang-merah-anjlok-jadi-rp4-ribu-kg>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> <http://www.koran-sindo.com/read/1036347/151/harga-bawang-anjlok-petani-minta-pemerintah-intervensi-1440387935>

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/621695-april-2015--nilai-tukar-petani-turun-1-37-persen>

Kegagalan Paket Bali mencapai kesepakatan untuk Proposal Cadangan Pangan Publik (Public Stockholding) telah memberikan kontribusi pada semakin parahnya situasi pangan nasional. Hal ini karena upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui proposal ini telah gagal, terlebih lagi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemungkinannya pun telah tertutup rapat.

Lebih lanjut, sebagai kebijakan yang krusial pada keberlangsungan hidup manusia, pertanian tidak semata dilihat dampaknya pada sektor ekonomi semata. Kondisi kekurangan gizi pun menjadi turunan langsung dari buruknya krisis pangan yang terjadi hari ini.



Sumber: Katadata.co.id<sup>11</sup>

Bank Dunia kerap kali menyebut penduduk Indonesia semakin sehat yang tercermin pada angka harapan hidup yang meningkat dari 68 tahun menjadi 71 tahun selama rentang sepuluh tahun. Dalam rentang yang sama, jumlah kematian bayi pun menurun drastis dari 48 menjadi 31 kematian per seribu kelahiran bayi. Walau angka kematian bayi turun, masih banyak balita yang mengalami malnutrisi. Sebesar 12 persen balita bertubuh kurus dan 37 persen balita bertubuh kecil. Kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi pun masih cukup tinggi hingga 190. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand (26) dan Vietnam (49).

Dengan carut-marutnya krisis yang terjadi hari ini, pengeluaran yang dilakukan untuk menghadiri KTM WTO sungguhlah kemewahan yang tidak kita semua miliki. Menurut Kenya Institute Public Policy Research and Analysis (Kippra), pada KTM ke-10 setiap delegasi akan menghabiskan rata-rata Sh97,154.25 perhari (sekitar Rp1.319.911.970) dan delegasi akan tinggal selama setidaknya enam hari.<sup>12</sup> Bukankah daripada energi dan pembiayaan pemerintah dialokasikan untuk menghadiri KTM ke-10, lebih baik dana tersebut digunakan untuk menggenjot subsidi dan pemberdayaan petani lokal dan kesehatan masyarakat?

## Tolak KTM 10 WTO:

### 1. Perundingan WTO Tidak Demokratis

Setelah WTO gagal membuktikan relevansinya selama 20 tahun ini untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang mengentaskan problem krisis sosial-ekonomi yang ada -jika tidak malah memperparah krisis- mekanisme pengambilan keputusan WTO pun terbukti tidak demokratis dan tidak mengedepankan asas keterbukaan dan keadilan. Hal ini berdampak terhadap capaian kesepakatan yang tentunya merugikan kepentingan negara berkembang.

Proses yang tidak demokratis ini terlihat dari praktik perundingan yang kerap terjadi di ruang tertutup dan melibatkan hanya negara tertentu. Praktik ini disebut dengan perundingan 'Green

<sup>11</sup><http://katadata.co.id/infografik/2015/02/27/harapan-hidup-meningkat-tapi-bayi-malnutrisi>

<sup>12</sup>[http://www.standardmedia.co.ke/m/story.php?articleID=2000171404&story\\_title=Over-20-countries-confirm-participation-at-2015-WTO-Conference-in-Nairobi](http://www.standardmedia.co.ke/m/story.php?articleID=2000171404&story_title=Over-20-countries-confirm-participation-at-2015-WTO-Conference-in-Nairobi)

*Room*. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup ini lah, pertukaran dan *lobby-lobby* kepentingan dilaksanakan. Upaya trade-off kepentingan terjadi dalam ruang ini. Hal ini menjadikan WTO hanya menjadi kesepakatan antar elit yang efeknya menghantam kepentingan rakyat kecil. Pun, rakyat dan masyarakat sipil tidak memiliki pengawasan atas apa yang terjadi di pertemuan-pertemuan tersebut. Kesepakatan Paket Bali adalah salah satu contoh praktik dari tidak demokratisnya proses perundingan di WTO.

Dalam upaya merundingkan program kerja Paska Kesepakatan Bali untuk dicapai pada KTM ke-10 WTO nanti, praktik ini kembali didorong oleh Direktur Jendral WTO (*Director General/DG*), Roberto Azevedo. Hal ini dapat disimpulkan dari tiga kejadian: **pertama**, dua hari sebelum batas akhir penetapan Program Kerja, Dewan Umum (*General Council*) WTO menggelar sidang untuk membahas kesepakatan Program Kerja Pasca Bali, yakni pada 27-28 Juli 2015. Sidang ini terjadi di luar kebiasaan WTO dan tentu terjadi secara tertutup.

Foto: KAL's Cartoons, The Economist



**Kedua**, selama menuju pembentukan program kerja, DG Azevedo mengadakan banyak ruang-ruang konsultasi kecil dan tertutup yang mengundang hanya segelintir negara anggota (Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India, Brazil, Australia, dan Jepang).<sup>13</sup> **Ketiga**, DG Azevedo berposisi sangat berpihak pada negara maju dengan mengadakan ruang-ruang konsultasi tertutup diantara 7 negara tersebut.

Diberitakan bahwa fokus yang dibahas terkait bantuan pertanian, kompetisi ekspor, dan akses pasar pada produk pertanian dan non-pertanian (NAMA) – yang mana kepentingan masing-masing negara ini akan menjadi modalitas pertukaran kepentingan (trade-off) dengan Perjanjian Trade Facilitation dan beberapa kepentingan negara maju lainnya. Praktik tukar guling ini dapat dipastikan untuk kembali menghambat perjuangan negara-negara berkembang terhadap isu fleksibilitas perlakuan spesial dan khusus (*special and differential treatment*) untuk negara berkembang dan kurang berkembang.<sup>14</sup>

## 2. Program Kerja Agenda KTM Ke-10 Mengancam Sektor Pertanian

Ada tiga draft kesepakatan yang akan menjadi rancangan Program Kerja Pasca Bali untuk dibahas dalam KTM Ke-10 WTO di Kenya, yaitu **pertama**, penyelesaian Proposal Public Stockholding; **kedua**, pengadopsian Perjanjian Trade Facilitation ke dalam WTO Marakesh Agreement Annex 1; **ketiga**, Post-Bali Work Programme akan menyusun prioritas basis untuk menghasilkan Keputusan Bali Ministerial lainnya (LDCs package and development issues) yang mengikat secara hukum (legally binding).

Disepakatinya Program Kerja Pasca Bali (Post-Bali work programme) dalam KTM Ke-10 WTO akan dijadikan sebagai puncak dari capaian kesepakatan Putaran Doha yang buntu sejak 2001, setelah Paket Bali berhasil sebagai Stepping Stone-nya.

Dalam proses penetapan program kerja ini, tarik-menarik kepentingan antara Perjanjian Trade Facilitation dengan Proposal G33 tentang Cadangan Pangan Publik kembali mengemuka.

<sup>13</sup><http://www.twn.my/title2/wto.info/2015/ti150607.htm>

<sup>14</sup> Ibid.

Kekecewaan kelompok negara berkembang terhadap negara maju atas tidak tercapainya solusi permanen tentang Proposal Cadangan Pangan Publik kembali menolak untuk menyepakati Perjanjian Trade Facilitation untuk diadopsi ke dalam Annex 1 Perjanjian Marakesh WTO.

Tentu saja ide untuk menyepakati isu pertanian oleh AS dan Eropa menjadi sangat tidak mungkin. Bahkan mereka kembali mengeluarkan tawaran yang tidak masuk akal. AS dan Eropa meminta agar dilakukan pengujian ulang terhadap mandat Program Pembangunan Doha (DDA). Pengujian ulang terhadap mandat DDA hanya akan membawa kemunduran bagi proses negosiasi yang telah berlangsung selama ini, khususnya dalam Perjanjian Pertanian.

G33, yang diketuai Indonesia, berpendapat, bahwa pengujian ulang mandate DDA hendak merendahkan ketentuan special products (SP) dan special safeguard mechanism (SSM) dalam isu pertanian yang telah ditetapkan dalam 2008 revised draft modalities text. Ketentuan ini merupakan mekanisme pengecualian bagi negara berkembang untuk mempertahankan kepentingan pertaniannya dari serbuan impor pertanian dari negara maju yang selama ini terus disubsidi oleh Negara, bahkan kian membesar jumlahnya.

Perundingan KTM Ke-10 WTO di Kenya telah kembali pada perdebatan sejati WTO, yakni antara kepentingan melindungi pertanian negara berkembang dengan ambisi pembukaan akses pasar produk pertanian negara maju. Perdebatan sejati ini akan kembali '*menyandera*' proses negosiasi dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Apalagi, proses perundingan WTO yang tidak demokratis dan terjadinya tukar-guling kepentingan akan menghasilkan Keputusan KTM Ke-10 WTO di Kenya yang merugikan serta melukai kepentingan negara berkembang, khususnya dalam upaya melindungi petani kecil dan mewujudkan ketahanan pangan.

Isu Pertanian adalah harga mati yang tidak bisa diperjual-belikan ataupun ditukar-tukar dengan kepentingan apa pun. Sehingga '*ancaman besar*' terhadap hancurnya sektor pertanian di dalam KTM Ke-10 WTO di Kenya harus dijadikan dasar bagi negara-negara berkembang, khususnya yang tergabung di G33, ataupun bagi negara kurang berkembang untuk memutuskan bahwa KTM Ke-10 WTO tidak perlu ada.

## **Posisi dan Rekomendasi**

Dari seluruh alasan diatas, maka IGJ mengambil posisi dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Menolak teks kesepakatan Paket-Bali yang merugikan negara-negara berkembang.**
2. **KTM ke-10, Nairobi tidak perlu ada.**
3. **Akhiri dominasi WTO.**
4. **Terus perkuat solidaritas rakyat untuk membangun alternatif sistem ekonomi dan perdagangan yang lestari dan berkeadilan. \*\*\*\***

***Disusun oleh:***

**Priska Sabrina Luvita,**  
*Knowledge Management Officer*  
Indonesia for Global Justice (IGJ)  
[priska@igj.or.id](mailto:priska@igj.or.id)

**Rachmi Hertanti**  
*Research & Monitoring Manager*  
Indonesia for Global Justice (IGJ)  
[rachmihertanti@gmail.com](mailto:rachmihertanti@gmail.com) / [amie@igj.or.id](mailto:amie@igj.or.id)